SKRIPSI

DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM *TROPICAL FOREST CONSERVATION* ACT-2 DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019-2024

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

VALENTINA ALISIA NISA

NIM. E.1112221014

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM *TROPICAL FOREST CONSERVATION* ACT-2 DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019-2024

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Politik Global

Oleh:

Valentina Alisia Nisa
E111222014

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBARAN PERSETUJUAN

DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM *TROPICAL FOREST CONSERVATION* ACT-2 DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019-2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Valentina Alisia Nisa

NIM. E11122204

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si
NIP. 197408102002122002

Tanggal: 9-7-2026.

Dosen Pembimbing Pendamping

Ratu Zahirah Lutfie, S.IP., M.Si.
NIDN 0013028008

Tanggal: 8-07-2026

HALAMAN PENGESAHAN

DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM *TROPICAL FOREST CONSERVATION* ACT-2 DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019-2024

Oleh:

Valentina Alisia Nisa

NIM. E.111222104

Dipertahankan di	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal	: Senin/ 20 Juli 2026
Waktu	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang

Tim Penguji

Ketua

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si.
NIP 197408102002122002

Sekertaris

Ratu Zahirah Lutfie, S.IP., M.Si.
NIP 198002132025212015

Penguji Pertama

24.8.26

Adityo Darmawan Sudagung, M.I.Pol.
NIP 199007232019031011

Penguji Pendamping

Hardi Alunaza S.D., S.I.P., M.H.I.
NIP 199012082023211020

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini membahas diplomasi lingkungan Indonesia melalui implementasi Program *Tropical Forest Conservation Act-2* (TFCA-2) di Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2019-2024. Penelitian berfokus pada kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya konservasi hutan tropis serta kontribusi TFCA-2 terhadap komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 15.2. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara bersama Direktur TFCA Kalimantan dan fasilitator program, serta studi dokumentasi dari laporan, jurnal, dan sumber resmi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan menggunakan tujuh indikator Diplomasi Lingkungan Susskind (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TFCA-2 berhasil mencerminkan praktik diplomasi lingkungan melalui pembentukan aliansi multipihak yang terdesentralisasi, koordinasi KEHATI sebagai pengelola dana, serta proses negosiasi yang didasarkan pada kerangka hukum TFCA 1998 dan pengalaman TFCA-1. Program juga mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Aktor non-pemerintah, seperti TNC, WWF, dan 71 mitra lokal, berperan penting dalam pelaksanaan program, sementara pengambilan keputusan didasarkan pada bukti ilmiah dan menghubungkan isu deforestasi lokal dengan agenda lingkungan global. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keberlanjutan pendanaan pascahibah, belum tuntasnya pengakuan hutan adat, dan terbatasnya evaluasi dampak jangka panjang. Penelitian merekomendasikan penguatan kolaborasi, diversifikasi pendanaan, percepatan pengakuan hutan adat, serta peningkatan sistem evaluasi untuk memperkuat diplomasi lingkungan Indonesia.

Kata Kunci: Diplomasi Lingkungan, TFCA-2, Konservasi Hutan, Kapuas Hulu

ABSTRACT

This research discussed Indonesia's environmental diplomacy through the implementation of the Tropical Forest Conservation Act-2 (TFCA-2) Program in Kapuas Hulu Regency in the 2019-2024 period. The research focused on cooperation between the government, non-governmental organizations, and the community in tropical forest conservation efforts as well as the contribution of TFCA-2 to Indonesia's commitments in the Paris Agreement and the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 15.2. The research employed a descriptive qualitative method. Data were collected using techniques of interviews with the Director of TFCA Kalimantan and program facilitators, as well as documentation studies from reports, journals, and official sources. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model which includes data reduction, data dsiplay, and conclusion drawing. Data validity was tested through source and method triangulation using the seven indicators of Susskind's Environmental Diplomacy (1994). The results showed that the implementation of TFCA-2 had succeeded in reflecting environmental diplomacy practices through the formation of a decentralized multi-stakeholder alliance, coordination of KEHATI as fund manager, and a negotiation process based on the TFCA 1998 legal framework and TFCA-1 experience. The program also integrated ecological, economic, and social aspects in sustainable development. Non-government actors, such as TNC, WWF, and 71 local partners, played an important role in program implementation, while decision-making was based on scientific evidence and connects local deforestation issues with the global environmental agenda. Nevertheless, there were still challenges in the form of funding sustainability after the grant, the incomplete recognition of customary forests, and limited long-term impact evaluation. The research recommended strengthening collaboration, diversifying funding, accelerating the recognition of customary forests, and improving the evaluation system to strengthen Indonesia's environmental diplomacy.

Keywords: Environmental Diplomacy, TFCA-2, Forest Conservation, Kapuas Hulu.



RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini memiliki judul "Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui Implementasi Program *Tropical Forest Conservation Act-2* (TFCA-2) di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019-2024". Penelitian ini membahas cara Indonesia melakukan diplomasi lingkungan dengan menggunakan skema debt-for-nature swap yang disebut *Tropical Forest Conservation Act-2* (TFCA-2), dengan fokus pada Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Penelitian ini dimulai dari masalah deforestasi global yang membahayakan iklim dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia sedang berusaha mencari cara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi lingkungan hidupnya.

TFCA-2 hadir sebagai alat diplomasi lingkungan yang dibuat melalui kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat sejak tahun 2011 dengan nilai sebesar 28,5 juta dolar AS, yang diurus oleh TNC, WWF, dan Yayasan KEHATI. Kapuas Hulu dipilih karena statusnya sebagai kabupaten konservasi, dengan lebih dari separuh wilayahnya termasuk dalam kawasan lindung, serta menjadi bagian dari inisiatif *Heart of Borneo*. Namun ironisnya Kapuas Hulu justru menjadi kabupaten dengan laju deforestasi yang masih tinggi di Indonesia pada 2024, sekitar 7.340 hektar, karena ekspansi perkebunan kelapa sawit, tambang emas ilegal, proses verifikasi hutan adat yang belum selesai, serta ketergantungan pada dana hibah yang terbatas. Kesenjangan antara komitmen dalam diplomasi lingkungan dan kondisi di lapangan ini menjadi dasar penelitian, karena belum

ada penelitian khusus yang membahas penerapan TFCA-2 di tingkat lokal di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah Indonesia melaksanakan diplomasi lingkungan melalui program TFCA-2 di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2019-2024. Tujuan utamanya adalah mengulas bagaimana diplomasi lingkungan dilaksanakan, termasuk cara kerja sama antar pihak yang terlibat, peran yang dimainkan dalam mencapai target NDC dari Perjanjian Paris dan tujuan SDGs 15.2, proses verifikasi hutan adat, serta kesulitan dalam hal pendanaan setelah hibah diberikan. Secara teori, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hubungan internasional, khususnya dalam hal diplomasi lingkungan yang melibatkan berbagai aspek, pengelolaan yang dilakukan di berbagai tingkat, efektivitas pertukaran utang untuk pelestarian alam, serta peran aktor yang bukan pemerintah. Secara nyata, hasil penelitian ini bisa dipakai oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, para donor seperti USAID, TNC, WWF, KEHATI, serta masyarakat sipil dan adat setempat sebagai acuan dalam mengevaluasi kebijakan konservasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Unit analisisnya adalah diplomasi lingkungan Indonesia di tingkat negara, sedangkan unit penjelasannya adalah TFCA-2 di tingkat kelompok negara, sehingga bersifat reduksionis. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan direktur TFCA Kalimantan serta fasilitator program, sedangkan data sekunder berasal dari studi dokumentasi dan referensi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan

teknik Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data ditingkatkan melalui triangulasi sumber dan metode teknik. Analisis ini didasarkan pada tujuh indikator teori Diplomasi Lingkungan Susskind tahun 1994.

Penelitian menunjukkan bahwa upaya diplomasi lingkungan Indonesia melalui TFCA-2 sudah mencapai hasil yang signifikan pada ketujuh indikator yang dianalisis. Program ini membangun kemitraan yang melibatkan banyak pihak secara bersama-sama melalui Dewan Pengawas.Pihak-pihak yang terlibat adalah pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, TNC, dan WWF dengan status yang sama.Koordinasi dilakukan oleh KEHATI, berdasarkan kerangka hukum TFCA 1998 dan pengalaman dari TFCA-1 di Sumatera. Integrasi pembangunan berkelanjutan tampak dari kenaikan luas kawasan lindung di Kalimantan (399.616 menjadi 572.062 hektar), partisipasi ekonomi masyarakat (2.809 menjadi 5.075 orang), dan kebijakan pengelolaan SDA (134 menjadi 196), sedangkan di Kpuas Hulu sendiri yang menjadi lokasi peneltian penguatan perlindungan kawasan dan spesies kunci, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam lestari, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, yang secara bersama-sama mendukung integrasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.

TNC, WWF, dan 71 mitra lokal secara aktif bekerja sama dengan komunitas Dayak Iban serta masyarakat adat lainnya, dengan mengimplementasikan keputusan program yang didasarkan pada bukti ilmiah seperti survei bioekologi bersama IPB dan estimasi karbon sebesar 29,16 juta ton. Isu deforestasi lokal juga terkait dengan berbagai agenda global seperti *Heart of Borneo*, REDD+, NDC,

dan SDGs. Sementara itu, media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat melalui liputan dari Mongabay dan penghargaan Equator Prize 2019. Namun, penelitian menemukan beberapa hambatan: pendanaan setelah hibah terasa tidak stabil (hanya 3 dari 26 mitra mendapatkan dana tambahan), proses verifikasi hutan adat belum selesai (12 usulan masih tertunda), dan evaluasi program baru hanya mengukur hasil, belum menilai dampak jangka panjang.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian mengajukan beberapa saran, KLHK bersama KEHATI dianjurkan untuk meningkatkan koordinasi secara berkala di tingkat kabupaten dan mengintegrasikan TFCA-2 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar program tidak sepenuhnya bergantung pada siklus dana hibah. Kementerian Luar Negeri sebaiknya mempersiapkan kerangka negosiasi lingkungan setelah TFCA-2 sejak awal, termasuk klausul perlindungan hak masyarakat adat dan dana jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diusulkan untuk menyelaraskan NDC dengan RTRW serta memperluas sumber dana melalui kredit karbon, dana desa, CSR, dan APBD. KEHATI dan pemerintah diusulkan untuk mempercepat pengakuan hutan adat, membuat sistem pengaduan, mengembangkan pemantauan menggunakan gambar dari satelit, serta mengubah penilaian dari fokus pada hasil ke dampak jangka panjang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Valentina Alisia Nisa

Nomor Mahasiswa : E1112221014

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini: merupakan hasil karya saya sendiri; tidak mengandung unsur plagiasi serta telah mempertimbangkan penggunaan artificial intelligence (AI) yang bertanggung jawab; belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 13 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Valentina Alisia Nisa

E1112221014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Skripsi Yang Baik Ialah Skripsi Yang Selesai"

"Commit your way to the Lord and trust in Him, and He will act" **(Mazmur 37:5)**

"Tetaplah rendah hati dalam keberhasilan dan kuat dalam setiap ujian" makna lagu karya Raim Laode

Persembahan:

Dengan segala rasa syukur yang terdalam, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan penyertan-Nya, dan terima kasih Bunda Maria atas terkabulnya segala permohonan melalui doa Novenan Tiga Salam Maria, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna. Sehingga dengan segala rasa syukur dan terima kasih, melalui kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk diri ku sendiri terima kasih sudah berusaha untuk selalu kuat dalam menghadapi setiap proses yang terasa berat, selalu percaya bahwa di balik kesusahan ada kemudahan, dan akhirnya *you did it*, Nisa.
2. Kepada kedua orang tua, Bapak dan Mamak tercinta dan tersayang. Terima kasih untuk perjuangannya, segala dukungan dan doa kalian. Kepada Bapak terimakasih sudah menjadi penghibur lewat candaannya disaat merasa tidak baik-baik saja, untuk Mamak ku tersayang terima kasih selalu mendoakan dan memeberikan nasehat. Terima kasih ya Pak dan Mak untuk segala dukungan dan pengorbananya.

3. Untuk ketiga saudara saya, kakak saya Nova dan Dea dan adik laki-laki saya Fido serta kakak sepupu saya Jocelina. Terima kasih atas segala dukungan serta doa-Nya yang selalu ada untuk saya. Selalu jadi penyemangat dalam masa senang maupun susah dan selalu mendukung proses yang dijalani.
4. Untuk ketiga sahabat saya Ema, Riya, Sofi yang sudah membersamai dari awal berkuliah hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi teman nugas, curhat, dan nongkrong. Terima kasih atas segala kebersamaan selama perkuliahan ini.
5. Untuk kak Glo, Jeje, Stefani yang berjuang bersama menyelesaikan skripsi, terima kasih untuk kebersamaan yang telah dilalui selama ini, serta segala dukungan dan saran yang diberikan selama mengerjakan skripsi dan segala kenanga hangat saat perkuliahan, canda tawa yang selalu terlihat ketika kita bersama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa penulis panjatkan, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini tepat pada waktunya yang berjudul "Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui Implementasi Program *Tropical Forest Conservation Act-2* Di Kabupaten Kapuas Hulu 2019-2024". Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian tugas akhir pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada proposal ini, mengingat kurangnya pengalaman penulis dalam menulis karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk perbaikan proposal ini di masa yang mendatang. Dalam penyusunan proposal ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Drs. Abdul Rahim, M.Si, selaku Ketua Pengelola PPAPK.

5. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
6. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga sejak tahap awal hingga tersusunnya proposal ini.
7. Ratu Zahirah Lutfie, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kesediaannya meluangkan waktu, memberikan dukungan, serta memberikan arahan dan pendampingan selama proses penyusunan proposal ini.
8. Adityo Darmawan Sudagung, S.H.Int, M.I.Pol, selaku dosen pembahas utama.
9. Hardi Alunaza SD, S.IP., M.HI. selaku deosen pembahas pendamping.
10. Kepada kedua informan yang telah memberikan kontribusi melalui kesediaannya untuk diwawancarai serta berbagi informasi yang relevan, sehingga mendukung kelengkapan data dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh staf program TFCA-2 yang telah membantu mempermudah dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.

Pontianak, 13 Juli 2026

Valentina Alisia Nisa
E1112221014

DAFTAR ISI

halaman

LEMBARAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

RINGKASAN SKRIPSI vii

PERNYATAAN KEASLIAN xi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN xii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR TABEL xx

DAFTAR BAGAN xxi

DAFTAR GAMBAR xxii

DAFTAR LAMPIRAN xxiii

DAFTAR SINGKATAN xxiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 12

1.3 Fokus Penelitian 13

1.4 Rumusan Masalah 14
1.5 Tujuan Penelitian 14
1.6 Manfaat Penelitian 15
1.6.1 Manfaat Teoritis 15
1.6.2 Manfaat Praktis 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
2.1 Definisi Konsep 18
2.1.1 Konsep Diplomasi 18
2.2 Teori Diplomasi Lingkungan 20
2.3 Hasil Penelitian Relevan 28
2.4 Alur Pikir Penelitian 33
2.5 Pertanyaan Penelitian 36
BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1 Jenis Penelitian 38
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 39
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 41
3.4 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi 42
3.5 Teknik Pengumpulan Data 43
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 45
3.7 Analisis Data 45
3.7.1 Keabsahan Data 46
3.7.2 Teknik Analisis Data 47
BAB IV GAMBARAN UMUM 49
4.1 Kondisi Lingkungan Indonesia 49
4.1.1 Diplomasi Lingkungan Indonesia 50

4.2 Sejarah Tropical Forest Conservation Act 52
4.2.1 Program Tropical Forest Conservation Act Indonesia 55
4.2.2 Program Tropical Forest Conservation Act Sumatera 57
4.2.3 Program Tropical Forest Conservation Act Kalimantan 61
4.3 Kabupaten Kapuas Hulu 69
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 76
5.1 Pembangunan Jaringan Aliansi Terdesentralisasi antara Aktor Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Implementasi TFCA-2 di Kabupaten Kapuas Hulu 76
5.2 Proses Pra-Negosiasi Indonesia-Amerika Serikat dalam Kerangka TFCA-2 dan Implementasinya di Kabupaten Kapuas Hulu 89
5.3 Integrasi Nilai-Nilai Pembangunan Berkelanjutan dalam Konservasi Hutan TFCA-2 di Kabupaten Kapuas Hulu (2019–2024) 97
5.4 Perluasan Peran Aktor Non-Pemerintah dalam Implementasi TFCA-2 di Kabupaten Kapuas Hulu 114
5.5 Keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan dan Politik dalam Pengambilan Keputusan Diplomasi Lingkungan TFCA-2 di Kabupaten Kapuas Hulu 121
5.6 Keterkaitan Isu Deforestasi Kapuas Hulu dengan Agenda Diplomasi Lingkungan Internasional melalui TFCA-2 126
5.7 Peran Media dalam Edukasi Publik dan Penyebarluasan Informasi mengenai Program TFCA-2 di Kabupaten Kapuas Hulu periode 2019–2024. 131
BAB VI PENUTUP 143
6.1 Kesimpulan 143
6.2 Saran 147
6.3 Keterbatasan Penelitian 151

DAFTAR PUSTAKA..... 153

LAMPIRAN..... 165

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....30

3.1 Waktu Penelitian 42

4.1 Tabel Capaian Mitra TFCA Dalam Medorong SDGs.....67

4.2 Tabel Kontribusi TFCA Kalimantan dalam SDGs.....68

5.1 Hasil dan Perkembangan Proyek TFCA di Kapuas Hulu Tahun 2019-2024 Integrasi Nilai-Nilai Pembangunan Berkelanjutan dalam Konservasi Hutan TFCA di Kabupaten Kapuas Hulu.....102

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1. Alur Pikir Penelitian..... 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1 Grafik Kehilangan Tutupan Pohon di Kapuas Hulu Tahun 2019-2024 7
4.1 Logo Program TFCA-Sumatera 57
4.2 Logo TFCA-Kalimantan 62
4.3 Letak dan Batas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Luas Wilayah 29.842 Km..... 70
5.1 Administrator dan Tim Teknis melakukan pembahasan proses sIklus 5 TFCA Kalimantan di kantor Yayasan KEHATI 80
5.2 Melaksanakan Sesi Diskusi di Kantor KEHATI 81
5.3 Koordinasi dan konsultasi Administrator Dengan Tim Teknis di Kantor KEHATI 82
5.4 Fasilitator Kabupaten Kapuas Hulu melakukan kunjungan assesment ke beberapa LPHD..... 83
5.5 Fasilitator Kapuas Hulu mendatatangani kerjasama multi pihak RKPD Kapuas Hulu..... 84
5.6 LPHD Bahenap Kapuas Hulu bersama fasilitator TFCA Kalimantan 86
5.7 Contoh Transaksi Pertukaran Utang Mengadopsi Model TFCA 94
5.8 Kontribusi capaian mitra TFCA Kalimantan pada SDGs 99
5.9 Dokumentasi dimensi ekonomi yang dilakukan LPHD.....111
5.10 Pertemuan dengan Oversight committee (OC) TFCA Kalimantan.....115
5.11 Tulisan di depan rumah panjang Sungai Utik 119
5.12 Riset Lutung Sentarum di danau Sentarum, kapuas Hulu Oleh (Fahutan IBB) 123
5.13 Peliputan Pembukaan Festival Rimba Di Sungai Utik 133
5.14 Liputan Jurnalis terkait survei enggang gading di Kapuas Hulu 135
5.15 Fasilitator kabupaten dan jurnalis mengunjungi lokasi survey enggang 136
5.16 Kampanye Publik, Partisipasi Event dan Presentasi Hasil Program TFCA Kalimantan dalam Talk Show di TVRI..... 138
5.17 Peliputan Nasional Oleh Mongabay..... 139

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

Lampiran 1 Biodata Penulis 164

Lampiran 2 Panduan Wawancara 165

Lampiran 3 Surat Tugas Perpustakaan UNTAN 171

Lampiran 4 Surat Tugas Perpustakaan FISIP UNTAN 172

Lampiran 5 Surat Tugas Wawancara Drektur Program TFCA Kalimantan 173

Lampiran 6 Surat Tugas Wawancara Fasilitator Program TFCA Kalimantan, Kapuas Hulu 174

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara Penelitian 175

Lampiran 8 Dokumen Perjanjian TFCA Kalimantan.....176

DAFTAR SINGKATAN

TFCA	*Tropical Forest Conservation Act*
TNC	*The Nature Conservancy*
WWF	*World Wide Fund for Nature*
HoB	*Heart of Borneo*
PKHB	Program Karbon Hutan Berau
REDD+	*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*
GRK	Gas Rumah Kaca
PPMHA	Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
SK	Surat Keputusan
MHA	Masyarakat Hukum Adat
FAO	*Food and Agriculture Organization*
DNS	*Debt for Nature Swap*
NGI	*Non-Governmental Interests*
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BKDS	Betung Kerihun-Danau Sentarum
SDGs	*Sustainable Development Goals*
NDC	*Nationally Determined Contribution*
CSR	*Corporate Social Responsibility*
KEHATI	Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
USAID	*United States Agency for International Development*
UNESCO	*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*
IKN	Ibu Kota Nusantara
SDA	Sumber Daya Alam
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup kini menjadi topik penting di seluruh dunia yang memerlukan perhatian dan langkah dari komunitas internasional. Setelah Perang Dingin berakhir, penelitian tentang Hubungan Internasional mulai berkembang dengan lebih pesat.Fokus pada keamanan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan militer, tetapi juga mencakup isu-isu keamanan non-tradisional seperti lingkungan hidup (Goara, dkk, 2023). Deforestasi merupakan isu lingkungan yang sangat serius saat ini, karena setiap tahunnya hutan di seluruh dunia menghilang sebanyak 10 juta hektar. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, tetapi juga memperparah perubahan iklim karena mengeluarkan karbon ke atmosfer dan mengganggu sistem sirkulasi air (FAO, 2020).

Krisis lingkungan di dunia semakin parah, sehingga tindakan bersama sangat penting.Terutama melalui komitmen pada SDGs target 15.2 yang menekankan perlunya menghentikan penebangan hutan agar dapat mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan pada tahun 2030 (Mawaddah & Zulkarnaini, 2025). Namun, upaya itu sering menghadapi kendala karena adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, seperti pengembangan pertanian dan pertambangan, dengan perlindungan lingkungan hidup.

Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas, menjadi negara ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Kongo, luas hutan hujan tropis Indonesia mencapai sekitar 126 juta hektare, yang mencakup sekitar 59% dari total daratan Indonesia dan sekitar 10% dari luas hutan tropis dunia, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Hutan tropis Indonesia bukan hanya tempat tinggal bagi jutaan jenis tumbuhan dan hewan, tetapi juga berperan penting dalam menyerap karbon untuk membantu mengurangi perubahan iklim global (Cintaning, A.B. 2025).

Namun, hutan Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang sangat berat karena kegiatan penebangan hutan dan penurunan kualitas tanah terus berlanjut. Peningkatan penggunaan lahan hutan untuk pembangunan, pemukiman, dan industri terus berlangsung.Selain itu, terjadi banyak kebakaran hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan penebangan liar yang semakin marak.Hal ini menyebabkan penurunan luas hutan secara signifikan (Ramadhan, L. P. 2025). Dalam konteks ini, diplomasi lingkungan sangat penting bagi negara-negara dalam mencari keseimbangan antara kepentingan pembangunan negara dan komitmen untuk menjaga lingkungan global.

Kondisi ini sangat terlihat di Kalimantan, di mana kualitas lingkungan dan luas hutan menurun, menjadi perhatian yang semakin besar. Hal ini ditandai dengan penurunan hasil produksi hutan, kemungkinan hilangnya berbagai jenis makhluk hidup, serta terpecahnya wilayah hutan yang sebelumnya saling terhubung. Penyebabnya adalah karena banyaknya perubahan fungsi hutan dan pengelolaan kayu yang tidak tepat (Sunni dkk., 2021). Kabupaten Kapuas Hulu

adalah salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang mengalami pengurangan tutupan hutan secara signifikan, yang menunjukkan adanya tekanan besar terhadap penebangan hutan karena perubahan penggunaan lahan (Iqbal, M. 2025).

Dalam menghadapi tantangan lingkungan global, Indonesia telah menciptakan diplomasi lingkungan sebagai bagian penting dari kebijakan luar negerinya. Diplomasi lingkungan di Indonesia berkembang dengan cepat sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana isu perubahan iklim menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri (Robertua & Sihura, 2020). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan bantuan dari luar negeri pada tahun 2030, sesuai dengan komitmen yang ditetapkan dalam NDC atau Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (Gaora, 2023). Namun, mewujudkan komitmen tersebut menghadapi permasalahan antara kebutuhan untuk berkembang secara ekonomi dan menjaga lingkungan hidup, terutama di tingkat daerah tertentu di mana tekanan untuk berkembang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan metode pendanaan yang inovatif dan kerja sama dengan negara lain agar usaha menjaga kelestarian alam Indonesia tetap berlangsung tanpa mengganggu kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu metode kreatif dalam diplomasi lingkungan internasional adalah skema tukar utang dengan alam, yang pertama kali diajukan oleh Thomas Lovejoy dari *World Wildlife Fund* pada tahun 1987. Skema ini memungkinkan negara yang memiliki utang mengalihkan sebagian pembayaran utang ke luar negeri menjadi dana untuk program melindungi lingkungan di dalam negeri, sehingga bisa

mengurangi beban utang sekaligus melindungi alam. Sudah diterapkan pertama kali di Bolivia pada tahun 1987, mekanisme ini semakin berkembang menjadi alat penting dalam mendanai konservasi di seluruh dunia. Hingga saat ini, mekanisme ini sudah menandatangani lebih dari 140 perjanjian, menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS untuk kegiatan konservasi. Selain itu, luas hutan hujan tropis yang dilindungi mencapai sekitar 68 juta hektar. Penelitian yang dilakukan secara nyata menunjukkan bahwa mekanisme ini sangat berhasil, terutama dalam program yang melibatkan Amerika Serikat, karena secara besar-besaran mengurangi tingkat pengurangan hutan di negara-negara yang menerima program tersebut (Gockel & Gray, 2011).

Tropical Forest Conservation Act (TFCA) adalah salah satu program tukar utang dengan perlindungan alam yang paling besar, yang disahkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1998. Program ini bertujuan untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang, khususnya yang memiliki hutan tropis dengan beragam jenis kehidupan, namun juga menghadapi beban utang dari luar negeri. Melalui mekanisme ini, pemerintah Amerika Serikat memberikan pengurangan atau restrukturisasi utang bilateral dengan syarat dana yang berhasil dihemat dialokasikan untuk konservasi hutan tropis serta pembangunan yang berkelanjutan, seperti yang disebutkan oleh Sheikh pada tahun 2018. Hingga saat ini, TFCA sudah diterapkan di 14 negara dengan total pengurangan utang lebih dari 248 juta dolar Amerika yang diubah menjadi dana untuk konservasi lokal. Tidak hanya mengurangi beban keuangan pemerintah, TFCA juga membantu menciptakan dana jangka panjang untuk melindungi keanekaragaman hayati,

mengelola kawasan perlindungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keunikan TFCA terdapat pada cara kerja yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah donor dan penerima, organisasi nirlaba mitra, serta administrator lokal yang menyalurkan dana bantuan ke pelaksana di lapangan (The Nature Conservancy, 2024).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima program TFCA dengan dua kesepakatan besar, yaitu TFCA Sumatera yang ditandatangani pada tahun 2009 dengan nilai hampir 30 juta dolar AS, dan TFCA Kalimantan yang ditandatangani pada tanggal 29 September 2011 dengan nilai 28,5 juta dolar AS. Tujuan umum dari program ini adalah melindungi keanekaragaman hayati yang penting, meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar hutan, mengurangi emisi serta deforestasi dan degradasi hutan, serta menjalankan program REDD+ di Indonesia (TFCA Kalimantan, 2023). TFCA Kalimantan direncanakan untuk empat kabupaten, yaitu Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kapuas Hulu. *The Nature Conservancy* (TNC) dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia ditunjuk sebagai mitra kerja sama, sedangkan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) bertugas sebagai administrator yang mengurus dan menyalurkan dana bantuan kepada lembaga pelaksana (Rusolono, Teddy, dkk, 2022).

Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu lokasi penting dalam penerapan TFCA Kalimantan karena mempunyai nilai ekologis dan strategis yang penting dalam rangkaian upaya konservasi daerah tersebut. Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 31.318,25 kilometer persegi,

atau sekitar 21,3% dari total luas Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini masih memiliki hutan yang luas, lebih dari 56% dari seluruh wilayahnya termasuk dalam kawasan lindung. Di dalamnya terdapat dua taman nasional yang terkenal, yaitu Taman Nasional Danau Sentarum dengan luas 132.000 hektar dan Taman Nasional Betung Kerihun dengan luas 800.000 hektar (Anandi dkk., 2020).

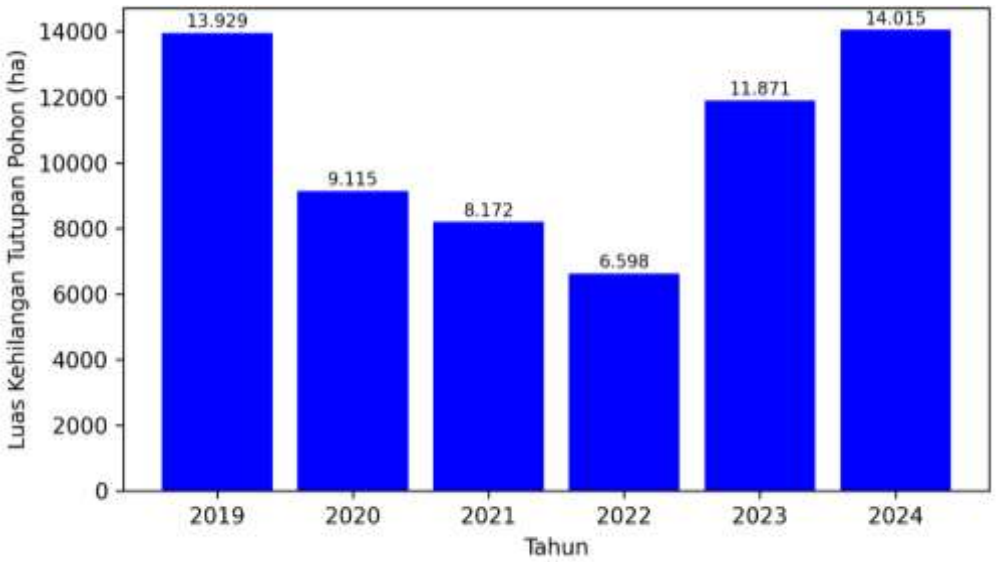
Kabupaten ini juga termasuk bagian penting dari inisiatif lintas batas *Heart of Borneo* (HoB), sebuah area konservasi yang bertujuan melindungi hutan hujan tropis tertua di dunia dengan luas mencapai 220.000 kilometer persegi. Untuk memperkuat komitmen dalam mengawetkan alam, pemerintah setempat menetapkan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai daerah konservasi melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015. Langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan, meskipun ada tekanan dari kebutuhan pembangunan ekonomi (Shantiko dkk., 2022). Namun demikian, status kabupaten konservasi ini menghadapi tantangan yang cukup rumit dalam mencari keseimbangan antara tujuan konservasi dengan kebutuhan pembangunan jalan, pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan peningkatan kualitas hidup warga setempat.

Cagar Biosfer Betung Kerihun-Danau Sentarum (BKDS) seharusnya mencerminkan keseimbangan antara manusia dan lingkungan alami. Namun kini wilayah ini menghadapi ancaman besar karena berkembangnya perkebunan kelapa sawit di hutan hujan tropis Kalimantan, yang menjadi tempat tinggal orang utan serta area hidup masyarakat adat. Koridor Bentarum, yang menjadi jembatan antara dua taman nasional serta benteng keanekaragaman hayati, telah kehilangan

ribuan hektar hutan karena perubahan penggunaan lahan. Perubahan ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengganggu tempat tinggal masyarakat, hutan rakyat Dayak, makam leluhur, serta rumah adat betang yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi (Lyn, 2025).

Kerusakan tersebut terjadi di area yang sudah dinyatakan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfer Dunia, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara pembangunan yang dijalankan di lapangan. Tanpa pengelolaan yang tepat, kecepatan deforestasi dan perubahan penggunaan lahan di wilayah BKDS dapat merugikan keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem yang menjadi dasar utama status cagar biosfer tersebut (Laia, K.2025). Deforestasi dan penurunan kualitas hutan masih menjadi masalah besar karena menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti melemahnya sistem ekosistem dan punahnya berbagai jenis makhluk hidup (Ramadhan, 2025).

Gambar 1.1 Grafik Kehilangan Tutupan Pohon di Kapuas Hulu Tahun 2019-2024



Sumber: globalforestwatch, 2025. Olahan Penulis, 2026.

Grafik 1.1 diatas menunjukkan luas kehilangan tutupan pohon di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2019-2024 berdasarkan data *Global Forest Watch* (2025). Data tersebut menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 kehilangan tutupan pohon mencapai 13.929 hektare, kemudian menurun menjadi 9.115 hektare pada 2020, 8.172 hektare pada 2021, dan mencapai titik terendah sebesar 6.598 hektare pada 2022. Namun, pada 2023 luas kehilangan tutupan pohon kembali meningkat menjadi 11.871 hektare dan mencapai 14.015 hektare pada 2024. Menurut *Global Forest Watch* (2025), kehilangan tutupan pohon dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konversi lahan, penebangan, maupun kebakaran hutan. Kehilangan tutupan pohon ini memicu kehilangan dominan yang akhirnya menyebabkan deforestasi (globalforestwatch, 2025).

Deforestasi dan degradasi lahan menjadi isu penting di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan upaya konservasi hutan. Beberapa alasan mengapa hutan di daerah ini semakin berkurang adalah karena pengembangan lahan untuk kebun kayu, buruan satwa liar, penebangan pohon untuk menambang emas secara ilegal, serta pengembangan perkebunan kelapa sawit. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan mengalami deforestasi tahunan dengan luas hutan yang gundul mencapai 7.340 hektar dari total luas deforstasi hutan Indonesia sebesar 261.575 hektar, angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Manurung, T., dkk 2024 & Iqbal, M 2025).

Pada tahun 2020, masyarakat adat Dayak Iban, Dayak Kalis, dan Dayak Punan di Kabupaten Kapuas Hulu memperjuangkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA/PPMHA) sebagai prasyarat pengelolaan hutan berkelanjutan. Secara tradisional, komunitas adat mengelola hutan berdasarkan nilai-nilai lokal yang menjaga keseimbangan ekologis, sehingga partisipasi mereka menjadi faktor kunci keberhasilan program konservasi seperti TFCA (Leo dkk., 2022). Namun, proses formal pengakuan hutan adat masih menghadapi kendala administratif dan politik, termasuk tantangan harmonisasi antara hukum adat dan kebijakan negara. Hingga tahun 2024, meskipun telah diterbitkan 8 SK PPMHA pada 2021 dan 4 SK pada 2023 serta diterimanya 12 usulan verifikasi hutan adat, masyarakat adat masih belum sepenuhnya memiliki otoritas atas hutan yang secara turun-temurun mereka kelola (Fawwaz, 2024).

Kekurangan perlindungan hukum terhadap hak milik masyarakat adat atas hutan adat menyebabkan terjadinya konflik, diskriminasi, dan bahkan tindakan kriminal terhadap masyarakat adat ketika mereka mencoba menjaga wilayahnya, meskipun Pasal 18B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa hak mereka diakui (Aryandini & Parvez, 2023). Pada kenyataannya, pemerintah dan perusahaan besar masih mengelola hutan, sementara masyarakat setempat sering kali tidak diberi akses dan bimbingan atas sumber daya yang mereka butuhkan untuk mendukung kehidupan sehari-hari mereka (Syarifullah & Baihaqi, 2020).

Oleh karena itu, kebijakan konservasi hutan tropis di Indonesia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pihak donor asing, dan masyarakat adat, dengan memperhatikan berbagai faktor lokal dan global seperti perubahan iklim

serta pertumbuhan pasar (Anto dkk., 2024). Pendekatan ini dianggap bisa meningkatkan pengelolaan hutan secara lebih efektif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah hutan (Shyamsundar dkk., 2021).

Meskipun ada bantuan dari program TFCA-2, pendanaan yang terus-menerus untuk melestarikan hutan dan membangun perekonomian daerah tetap menjadi tantangan besar. Evaluasi TFCA-2 menunjukkan bahwa dari 26 mitra yang telah selesai melakukan kegiatan konservasi, hanya 3 mitra yang berhasil mendapatkan dana tambahan dari CSR, dana desa, atau anggaran pemerintah daerah.Hal ini menunjukkan bahwa kelangsungan program masih sangat bergantung pada kemampuan mitra dalam mencari sumber dana di luar dana hibah awal (TFCA Kalimantan, 2020). Kondisi ini sesuai dengan masalah nasional, di mana laporan FAO mencatat defisit operasional tahunan di kawasan konservasi Indonesia sebesar 81,94 juta dolar Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa anggaran publik masih terbatas dalam mendukung pengelolaan dan pemulihan hutan tropis secara efektif.

Diplomasi lingkungan Indonesia melalui TFCA-2 dipilih karena program TFCA ini menjadi instrumen strategis yang menggabungkan pengurangan utang dengan komitmen konservasi hutan tropis sesuai NDC *Paris Agreement* dengan melibatkan kerjasama multi-stakeholder antara pemerintah AS, Indonesia, dan organisasi internasional seperti TNC dan WWF. Kapuas Hulu dipilih karena memiliki nilai ekologis yang penting, dengan 56% wilayahnya tercatat sebagai kawasan lindung, status sebagai kabupaten konservasi, dan letak strategis di dalam Heart of Borneo.Namun, ada kontradiksi karena wilayah ini mengalami

deforestasi yang sangat parah akibat berkembangnya perkebunan kelapa sawit dan adanya konflik soal hak masyarakat adat. Periode 2019-2024 dipilih karena merepresentasikan fase kritis setelah penerapan TFCA-2 yang mengalami peningkatan deforestasi di Indonesia, sehingga penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan program tersebut dalam mencapai keseimbangan antara konservasi, perlindungan hak adat, dan pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan pembiayaan yang berkelanjutan.

Selama ini belum ada tulisan yang secara langsung membahas dan menganalisis mengenai cara Indonesia melakukan diplomasi lingkungan melalui pelaksanaan program *Tropical Forest Conservation Act-2* di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 hingga 2024. Beberapa tulisan sebelumnya adalah penelitian yang ditulis oleh Masyithah Aulia Adhiem dengan judul "Mekanisme Pendanaan *Debt-For-Nature Swap* untuk Mendukung Konservasi Alam di Indonesia" (2024), yang membahas alternatif pendanaan berkelanjutan untuk menjaga alam di Indonesia. Selanjutnya ada tulisan dari Nurrinawati (2014) yang membahas penelitian tentang pengalihan hutang luar negeri Indonesia sebesar 30 juta dolar untuk kegiatan konservasi hutan tropis melalui proyek *Tropical Forest Conservation Action* (TFCA) di pulau Sumatera dan Kalimantan. Penelitian ini melihat bagaimana *Debt-For-Nature Swap* (DNS) membantu menjaga lingkungan serta mengurangi beban utang Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi manfaat bagi Amerika Serikat, seperti meningkatkan investasi di bidang lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa penelitian yang ada, terdapat beberapa hal yang belum dibahas atau dipertimbangkan dalam literatur yang tersedia. Hingga kini, belum ada penelitian yang secara langsung membahas dan menganalisis cara Indonesia melakukan diplomasi lingkungan melalui pelaksanaan program *Tropical Forest Conservation Act-2* (TFCA-2) di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam periode tahun 2019 sampai 2024. Penelitian sebelumnya umumnya melihat TFCA dari segi mekanisme pendanaan atau manfaat diplomasi antar negara secara makro, tanpa memperhatikan bagaimana program itu diterapkan di tingkat lokal yang memiliki kompleksitas ekologis dan sosial yang tinggi, seperti di Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengatasi kekurangan tersebut dengan menganalisis cara diplomasi lingkungan Indonesia melalui TFCA-2 yang diterapkan di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam upaya menyeimbangkan antara konservasi, perlindungan hak masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan dari tahun 2019 hingga 2024.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Komitmen diplomasi lingkungan Indonesia belum sejalan dengan realitas di Kapuas Hulu yang masih mengalami tekanan deforestasi dan degradasi dari tahun 2019-2024.
2. Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi menghadapi ekspansi ekonomi yang terus merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati 2020-2024.

3. Pengakuan hak masyarakat adat belum terlindungi secara optimal, kesejahteraan masyarakat belum terlihat, tantangan didalam pendanaan 2019-2024.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana program Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis atau *Tropical Forest Conservation Act-2* (TFCA-2) diterapkan di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam konteks upaya diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia. Fokus ini didasarkan pada situasi yang mengecewakan di lapangan, di mana Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan sebagai daerah konservasi dan mendapat dukungan dari program TFCA-2 masih mengalami deforestasi, dengan tingkat deforestasi yang tinggi terjadi di Indonesia mencapai 7.340 hektar pada tahun 2024. Situasi ini menunjukkan pentingnya analisis yang matang mengenai seberapa jauh program TFCA-2 berperan sebagai alat dalam diplomasi lingkungan, dalam upaya menyeimbangkan komitmen terhadap konservasi, perlindungan hak masyarakat adat, serta pembangunan yang berkelanjutan, yang lebih dari sekadar memenuhi komitmen resmi NDC di bawah Perjanjian Paris.

Periode 2019-2024 dipilih karena mencerminkan masa jabatan kedua Presiden Jokowi yang kritis, di mana kebakaran hutan dan lahan sangat parah, menghanguskan jutaan hektar tanah, deforestasi terus meningkat karena pengembangan tambang dan perkebunan, polusi udara di Jakarta menjadi yang paling parah di dunia, dan pembangunan besar-besaran Ibu Kota Negara serta

industri nikel mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati di Kalimantan dan Sulawesi. Oleh karena itu, setelah penangguhan penyaluran dana hibah TFCA Kalimantan sejak tahun 2014, masa ini menjadi kesempatan yang tepat untuk menganalisis bagaimana program tersebut berjalan di lapangan, termasuk meningkatnya deforestasi dan degradasi lahan, tekanan terus-menerus terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, proses pengakuan hutan adat yang belum selesai, serta tantangan dalam pengadaan dana yang berkelanjutan dan konflik yang belum terselesaikan antara konservasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, berbagai isu ini masih belum tuntas hingga tahun 2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang dibuat oleh peneliti tentang "Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui Implementasi Program *Tropical Forest Conservation Act-2* di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019-2024", dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana cara melakukan Diplomasi Lingkungan Indonesia melalui pelaksanaan *Program Tropical Forest Conservation Act-2 di* Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang diusulkan oleh peneliti mengenai "Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui Pelaksanaan Program *Tropical Forest Conservation Act-2* di Kabupaten Kapuas Hulu 2019-2024," penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi lingkungan Indonesia melalui program TFCA-2 di Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2019 hingga

2024. Analisis mengenai diplomasi lingkungan akan dijelaskan dengan mendeskripsikan mekanisme kerja sama multipihak dalam pelaksanaan program di tingkat lokal, menganalisis kontribusi program terhadap upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka komitmen NDC Perjanjian Paris dan SDG 15.2, tekanan yang tidak berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, proses verifikasi hutan adat yang belum tuntas, serta tantangan pendanaan berkelanjutan dan ketegangan yang belum terselesaikan antara konservasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Kapuas Hulu.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada bidang Hubungan Internasional, terutama dalam mempelajari diplomasi lingkungan yang bersifat multidimensi. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang cara instrumen diplomasi lingkungan berfungsi dalam negara-negara berkembang, di mana masalah antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan lebih rumit dibandingkan di negara-negara yang sudah maju. Kedua, dengan menganalisis penerapan di tingkat daerah provinsi, penelitian ini membantu memperkaya pemahaman tentang pengelolaan multilevel dalam isu lingkungan global, terutama bagaimana kebijakan internasional dijalankan melalui berbagai tingkat pemerintahan untuk mencapai hasil yang nyata di tingkat lokal. Ketiga, penelitian ini akan membantu memperkaya pembicaraan mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan iklim dan konservasi bekerja, terutama

pertukaran utang dengan konservasi alam (*debt for nature swap)*, dengan memberikan contoh nyata dari Indonesia yang bisa dibandingkan dengan pengalaman di negara lain. Keempat, penelitian ini membantu memahami peran yang dimainkan oleh aktor non-negara, khususnya organisasi masyarakat sipil internasional dan lokal, dalam proses diplomasi lingkungan serta pelaksanaan kebijakan konservasi. Kelima, hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kelanjutan program konservasi yang didanai dari luar, sebuah topik yang semakin mendesak di tengah situasi pendanaan iklim global. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membantu mengisi kekurangan data empiris mengenai TFCA-2 di Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi juga memberikan sumbangan penting dalam bidang teori terkait studi diplomasi lingkungan serta pengelolaan lingkungan global.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberi manfaat besar bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan konservasi dan diplomasi lingkungan di Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan, temuan dari penelitian ini bisa memberikan gambaran yang berguna untuk memperbaiki strategi diplomasi lingkungan dan proses negosiasi pendanaan iklim di masa depan. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, studi ini bisa memberikan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan TFCA yang bisa menjadi acuan untuk meningkatkan pengelolaan konservasi serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Bagi para donor internasional dan mitra

pelaksana seperti USAID, TNC, dan WWF, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki desain serta pelaksanaan program TFCA di masa depan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Bagi pengurus program seperti Yayasan KEHATI dan pihak yang menerima dana hibah, studi ini bisa memberikan pemahaman tentang cara terbaik dalam mengelola program konservasi yang didanai oleh hibah internasional serta pembelajaran yang didapat selama prosesnya. Bagi masyarakat setempat dan organisasi masyarakat sipil di Kapuas Hulu, penelitian ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pendapat mereka serta meningkatkan peran mereka dalam mengambil keputusan terkait konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi dunia akademis, tetapi juga membantu meningkatkan kebijakan serta cara-cara dalam mengelola konservasi di Indonesia.